IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Oleh:

Citra Renja Trisnawati
171010048

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh:

Citra Renja Trisnawati
171010048

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM

TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Renja Trisnawati

NPM : 171010048

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kota Batam adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

CITRA RENJA TRISNAWATI

171010048

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Salah satu syarat untuk memenuhi
memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Citra Renja Trisnawati
171010048

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti di bawah ini

Batam, 23 Juli 2021

Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah merupakan tahap dimana untuk menilai apakah peraturan tersebut memberikan dampak nyata terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa mengenai permasalahan usaha peternakan yang mendirikan bangunannya di area pemukiman dan mengganggu aktifitas masyarakat akibat limbah kotoran dan gangguan lainnya yang disebabkan oleh ternak. Keberadaan peternak liar masih sering ditemui, biasanya mendirikan lahan peternakan berdekatan dengan sumber air dan pemukiman. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam sudah berjalan sangat baik, tapi belum maksimal karena belum mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. penelitian ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu karakteristik dari masalah yang belum tertangani dengan baik, karakteristik dari isi kebijakan yang jelas dan rinci membuat Peraturan Daerah dapat dipahami oleh implementator maupun dapat disalurkan ke masyarakat luas, dan karakteristik lingkungan yang belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Usaha Peternakan.

ABSTRACK

Implementation of Regional Regulations is the stage where to assess whether the regulations have a real impact on the problems that are happening and achieve the desired goals. This study was conducted to analyze the problems of livestock businesses that build buildings in residential areas and interfere with community activities due to sewage and other disturbances caused by livestock. The presence of illegal breeders is still often encountered, usually establishing livestock land adjacent to water sources and settlements. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Livestock and Animal Health Businesses in Batam City and to find out the factors that influence the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Animal Husbandry and Animal Health Businesses in Batam City. The method used in this research is a qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study were sourced from primary and secondary data. The techniques used in data collection are interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Livestock and Animal Health Businesses in Batam City has been going very well but has not been maximized because it has not achieved the targets that have been set. This study uses 4 (four) indicators, namely communication, resources, disposisi and bureaucratic structure. Based on the results of the research, the factors that influence the implementation are the characteristics of the problems that have not been handled properly, the characteristics of the clear and detailed policy contents that make the Regional Regulations understandable to the implementer and can be distributed to the wider community, and the environmental characteristics that have not been maximized.
Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Livestock Business*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan laporan tugas akhir ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, sebuah kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr.Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.A.P. Selaku pembimbing Skripsi dapat Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Universitas Putera Batam, yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya.

7. Ibu Ir. Sri Yunelli selaku Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Bapak drh. Samuel Tampubolon selaku Kasi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyusun skripsi selama melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
8. Bapak Jhonson, Bapak Marzuki dan Bapak Roy selaku peternak hewan yang berada di Kecamatan Sei Beduk serta Ibu Khoiri selaku masyarakat yang telah bersedia memberikan kesempatan dan waktunya untuk membantu peneliti dalam segala hal.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda Sucipto dan Ibunda Suyatmi serta Kakakku Tomy Sandra Irawan yang sangat Sayangi dan yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
10. Untuk Temanku Kristina Romauli Sianturi yang selalu menemani dan mendukung dalam penulisan penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kelancaran penyususnan skripsi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan, dan hasil laporan dapat bermanfaat.

Batam, 25 Juni 2021

Citra Renja Trisnawati

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Teori Dasar 11
2.1.1 Kebijakan Publik 11
2.1.2 Implementasi Kebijakan 15
2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan 17
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan 24
2.1.5 Faktor Yang Menghambat Kebijakan 27
2.2 Penelitian Terdahulu 28
2.3 Kerangka Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 Fokus Penelitian 33
3.3 Sumber Data 34
3.4 Teknik Pengumpulan Data 35
3.5 Teknik Analisis Data 37
3.6 Keabsahan Data 39
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Hasil penelitian 42
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 42
4.1.2 Profil Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 48
4.1.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam. 51
4.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam 63
4.2 Pembahasan 67
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam 67
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam 72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 75
5.1. Simpulan 75
5.2. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN 3 SURAT PENELITIAN
LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses hirarki kebijakan secara umum 13
Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier 25
Gambar 2.3 Kerangka penelitian 32
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive data) 37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam 44
Gambar 4.2 Pegawai berdasarkan Pendidikan 48
Gambar 4.3 Pegawai berdasarkan eselon 49
Gambar 4.4 Sosialisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam 54
Gambar 4.5 Presentasi komposisi pegawai 57
Gambar 4.6 Sidak Pihak Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan 60
Gambar 4.7 Prosedur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Ternak Kota Batam 4
Tabel 1.2 Daftar kelompok peternakan Kota Batam 4
Tabel 3.1 Informan Penelitian 36
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 41
Tabel 4.1 Profil Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kota Batam 49
Tabel 4.2 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam 57
Tabel 4.3 Fasilitas Usaha Peternakan Kota Batam 58

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang peternakan adalah subsektor berkonstribusi pada perekonomian Indonesia dalam upaya memperbaiki ekonomi yang rendah. Meningkatkan dan mencukupi status gizi masyarakat, terutama dalam pemenuhan protein hewani dan kalori dapat diperoleh dengan ketersediaan hasil peternakan yang mencukupi. Peternakan menjadi sektor yang banyak dikembangkan oleh masyarakat setelah pertanian. Kegiatan peternakan bertujuan untuk meningkatkan hewan ternak dengan cara produksi dan reproduksi yang secara langsung diambil manfaatnya dari hewan tersebut. Secara umum peternakan merupakan semua urusan yang berhubungan dengan sumber daya fisik seperti benih, pakan, mesin dan peralatan peternakan, melalui proses pembiakan ternak, panen, pascapanen produksi, serta pemasaran. Mendirikan tempat untuk beternak haruslah mengetahui faktor-faktor pendukung agar usaha tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Persediaan pakan dan kandang ternak harus mengikuti tipe dari karakteristik ternak yang dipelihara. Pencegahan penyakit pada ternak juga sangat penting, hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang menkonsumsi daging ternak ataupun produk hewan lainnya. Tindakan yang dilakukan dalam pencegahan penyakit pada hewan seperti, kebersihan kandang hewan, pemberian vaksinasi, mengatur ventilasi dan jarak pada kandang, pemberian pakan yang baik dan sanitasi kandang.

Kota Batam sebagai salah satu tempat yang mempunyai usaha peternakan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baik dari bentuk skala kecil sampai skala menengah. Pendirian usaha peternakan ini bertujuan sebagai suatu bentuk kemandirian daerah Batam dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging. Pemerintah turut mendukung para pengusaha peternakan dalam mewujudkan tujuan berkembangnya sektor peternakan. Kota Batam merupakan daerah yang sedang berkembang berupaya menciptakan sumber daya yang nantinya bisa mengatasi ketahanan pangan masyarakat Batam dalam jangka waktu lama, dan nantinya akan menciptakan kemandirian daerah dalam upaya menjadi daerah yang berdikari.

Pemerintah dalam hal ini membuat dan mengesahkan sebuah undang-undang terkait dengan peternakan dan Kesehatan hewan sebagai tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan yang belum lama ini ditetapkan oleh pemerintah diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada serta memiliki pengaruh dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur usaha peternakan termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam. Kebijakan yang dibuat dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan mutu dari sumber daya hewani, kesejahteraan ternak serta menjaga ketentraman masyarakat. Melihat populasi penduduk Kota Batam yang lebih dari satu juta jiwa, maka sangat perlunya sebuah payung hukum di bidang peternakan. Tujuan di bentuknya peraturan daerah tentang peternakan agar hewan yang diternakkan bisa dikontrol terkait dengan kesehatan, kesejahteraan hewan, ekosistem, pakan hewan yang sesuai dengan standar. Masyarakat juga merasa aman dalam mengkonsumsi

produk ternak yang dipasarkan. peraturan daerah ini juga sebagai dasar pengatur agar para peternak lebih tertib dalam mendirikan tempat ternak sesuai dengan daerah yang telah ditentukan sebagai lahan peternakan, sehingga tidak mengganggu aktifitas dan tata ruang wilayah.

Potensi Kota Batam sebagai wilayah yang cukup memadai dalam pendirian usaha peternakan dapat dilihat dari jumlah perkembangan penduduk yang melonjak tajam. Menurut data yang bersumber dari BPS total penduduk Kota Batam di tahun 2019 diperkirakan 1,107,551 jiwa dan untuk tahun 2020 sebanyak 1,118,848 jiwa dengan prediksi kenaikan 1,02%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab tingkat konsumsi daging pada masyarakat. Pertama, meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan daging semakin meningkat setiap tahunnya. Kedua, meningkatnya daya beli masyarakat yang membuat kebutuhan daging hewan meningkat. Ketiga, meningkatnya kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi daging. Keempat, meningkatnya jumlah wisata kuliner restoran dan rumah makan di Kota Batam. Faktor-faktor tersebut membuat pemerintah maupun para pihak yang berkepentingan mendirikan lebih banyak berbagai jenis peternakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kota Batam sendiri, dari dua belas Kecamatan terdapat sembilan jenis komoditi ternak yang dikembangkan, baik ternak kecil, ternak besar maupun ternak unggas. Ternak sapi dan kambing di wilayah Kecamatan Sekupang merupakan penampungan sementara sebelum dipotong untuk kebutuhan daging di Kota Batam. Ternak babi di Kecamatan Nongsa tepatnya berada di Pulau Kubung sebagai tempat penampungan

sebelum dipotong, juga ada ternak yang khusus dipelihara oleh masyarakat sebanyak 282 ekor. Berikut data populasi ternak yang berada di Kota Batam:

Tabel 1.1 Populasi Ternak Kota Batam

No	Jenis Ternak	Kecamatan												Total
		Batam Kota	Batu Aji	Batu Ampar	Bengkong	Lubuk Baja	Nongsa	Sekupang	Sei Beduk	Sagulung	Blkng Padang	Bulang	Galang	
1	Sapi	293	80	26	224	50	48	1.671	102	199	124	89	125	3.031
2	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kuda	-	-	-	4	-	-	3	8	-	-	-	-	15
4	Kambing/Domba	574	282	292	436	90	121	7.666	316	408	89	60	61	10.395
5	Babi	-	-	-	-	-	3.100	-	1.200	-	-	278.000	-	282.300
6	Ayam Buras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ayam Ras pedaging	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000	900.000	-	3.440.000	9.160.000	14.580.000
8	Ayam ras peterlur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	105.000	111.000
9	Itik Pedaging	-	-	-	-	-	-	1.300	5.000	-	-	-	-	6.300
10	Itik Petelur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kelinci	-	-	-	-	-	-	170	25	50	-	-	-	245
12	Puyuh	-	-	-	-	-	5.000	-	15.000	-	-	-	-	20.000

(Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan peternakan Kota Batam, 2020)

Para pengusaha peternakan juga mendirikan asosiasi pedagang atau usaha peternakannya. Menurut data dinas ketahanan pangan dan peternakan terdapat 134 anggota kelompok peternak dengan beberapa jenis ternak yang ada di Kota Batam. Tujuan didirikan asosiasi ternak adalah meningkatkan kesejateraan para peternak dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat serta mengembangkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan para anggota. Berikut daftar kelompok peternakan di Kota Batam:

Tabel 1.2 Daftar kelompok peternakan Kota Batam

No	Lokasi Kelompok Ternak	Nama Kelompok Ternak	Jumlah Anggota
1	Tanjung Kubu, Bulang lintang Kec. Bulang	Lembu Jaya	14
2	Kelurahan Air Raja, Kec. Galang	Kukulang II	10
3	Kelurahan Rempang	Tunas Mandiri	3
4	Kelurahan Keras, Kec. Galang	Mawar Putih	7

5	Kelurahan Kasu, Kec.Galang	Maju Jaya	24
6	Kelurahan Karas, Kec Galang	Mawar Merah	19
7	Bulang Kebam, Kec. Bulang	Kemang abadi	8
8	P. Galang Baru, Kec. Galang	Team Anak Tani	2
9	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Sinar Karya	6
10	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Kemang Abadi II	8
11	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Sinar Karya II	3
12	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Mekar Sari	5
13	Bulang Lintang, Kec. Bulang	Mekar Sari II	5
14	Kelurahan Setokok, Kec. Bulang	Setokok Jaya	5
15	Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	Putera Jaya Sukses	5
16	Kelurahan pecong, kec. Belakang padang	Karya Sepakat I	5
17	Kelurahan pecong, kec. Belakang padang	Karya Sepakat II	5
TOTAL			134

(Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan peternakan Kota Batam, 2020)

Syarat utama dalam mendirikan usaha peternakan yang harus terpenuhi adalah kepastian lahan yang digunakan. Tujuannya agar usaha peternakan bisa diakui secara legal dan bisa berkembang secara pesat. Kota Batam dalam hal pendirian ternak masih terkendala kepastian lahan, sehingga mempengaruhi beberapa aspek seperti kurangnya jenis produksi peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan peminatan daging yang sangat tinggi membuat Pemerintah Kota Batam melakukan impor dari luar negeri maupun mendatangkan dari luar daerah (Kepri.antaranews.com, 2018).

Aparat masih menemukan beberapa pengusaha ternak yang mendirikan lahan peternakannya dekat lahan pemukiman penduduk, yang seharusnya menempati lahan yang sudah dipetakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat khusus lahan peternakan. Peternakan yang didirikan dekat pemukiman akan mengganggu aktifitas warga sekitar dan menimbulkan ketidaknyamanan. Limbah kotoran dan pakan hewan merupakan dampak nyata yang mencemari area pemukiman dan sulit untuk cara pengelolaanya. Maraknya aktifitas peternakan di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya maka Pemerintah Kota Batam mengambil kebijakan tegas dengan menertibkan peternakan liar dan yang paling utama berada diarea pemukiman warga. Relokasi ternak babi memang harus di Pulau Bulan, hal ini memang sudah ada pada aturan Walikota Batam. Ternak lainnya seperti, ternak kambing dan juga sapi yang relokasinya terletak pada daerah interlen.

Pemerintah Kota Batam menyoroti penertiban peternakan babi. Daerah Batam tidak diperuntukkan bagi peternak babi, sementara dari tahun ke tahun peternak babi semakin bertambah dan tanpa memiliki surat izin usaha yang jelas. Beberapa peternak babi liar yang mendirikan peternakannnya di pemukiman warga, sehingga mengganggu dan meresahkan masyarakat yang ada di daerah tersebut (Batam.tribunnews.com, 2019). Peternak babi juga mendirikannya didekat sumber air warga yang tentunya sangat tidak layak bila air tersebut dikonsumsi masyarakat, salah satunya ada di dekat Dam Duriangkang. Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusahakan relokasi peternakan babi liar, serta menertibkan beberapa keramba ilegal yang bisa mengancam sumber air baku di Batam(batampos.co.id, 2017). Kepala

Ditpam PB Batam mengonfirmasikan bahwa pihaknya belum memiliki lahan untuk merelokasi 33 peternak yang berada di Kawasan sekitar Waduk Duriangkang. Mengacu peraturan otonomi daerah tata ruang Batam tidak ada pengalokasian untuk peternakan babi di kawasan hutan lindung. Teknisnya penertiban dilakukan dengan proses penembakan ternak babi, setelah itu dikumpulkan dalam satu lubang untuk dibakar. Proses ini diambil agar bakteri berbahaya tidak berkembang(Liputan6.com, 2017).

Terkait dengan tata ruang wilayah mengenai lahan atau wilayah yang dijadikan usaha peternakan, di Kota Batam sendiri belum ada pengesahan terkait dengan kebijakan yang mengatur rencana tata ruang wilayah dan masih dalam bentuk wacana. Pihak dinas ketahanan pangan dan peternakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Riau. Disebutkan pasal 99 ayat 2, sanksi administratif yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang mendirikan usaha tidak sesuai dengan aturan meliputi, peringatan secara tertulis, menghentikan kegiatan sementara, pelayanan umum sementara dihentikan, mencabut izin usaha, membatalkan izin dan membongkar tempat usaha, menutup lokasi tempat usaha, memulihkan fungsi ruang dan denda administrasi.

Pihak pelaksana yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahap awal sudah melakukan sosialisasi tatap muka melalui kantor kelurahan tiap wilayah di Kota Batam, serta sosialisasi melalui berbagai jenis media informasi. Tahap selanjutnya pihak dinas aktif dengan instansi lainnya untuk bekerja sama dalam hal pengawasan dan pembinaan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan akan ada tahap penindakan

penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setempat. Kebijakan ini masih terbilang baru, sehingga sulitnya mengubah stigma masyarakat yang cenderung melakukan tindakan pengaturan yang salah.

Penelitian yang dilakukan oleh Isna, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga), yang termuat dalam pada Wacana, Volume 12, Nomor 3, Juli 2009. Metode penelitian dengan metode memfokuskan pada proses dan makna dari usaha pengembangan ternak. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi sangat susah terlaksana sebab tidak disokong oleh sumber daya finansial, kesigapan para pelaksana, kepastian tempat kawasan, kesanggupan sumber daya manusia, kepastian keamanan lokasi serta pelaksana cenderung menggunakan pendekatan *top-down*.

Dari uraian latar belakang di atas, maka persoalan yang timbul pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam menata dan menertibkan usaha peternakan, dengan kondisi masih banyaknya usaha peternakan yang mendirikan usahanya dekat dengan kawasan publik dan pemukiman warga, sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat karena limbah ternak yang mencemari lingkungan. Bagi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Pemerintah Kota Batam menjadi tantangan baru untuk dapat meningkatkan penertiban usaha peternakan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka judul penelitian yang dilakukan berjudul "**Implementasi Peraturan**

Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Kota Batam".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam?
2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang dijadikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Batam.
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pengembangan keilmuan Administrasi Publik secara umum dan kebijakan publik secara khusus.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah kota Batam yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan dan Peternakan Kota Batam terkait dengan implementasi penyelenggaraan usaha peternakan Kota Batam.

3) Manfaat akademis

Penelitian ini untuk memberikan sumber referensi bagi pembaca maupun penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2018:35) kebijakan publik merupakan suatu hal yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, penyebab peraturan wajib dikerjakan agar bermanfaat untuk kepentingan seluruh warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Kebijakan dikatakan sebagai hasil analisis yang sangat dalam dari berbagai alternatif yang tertuju kepada hasil tentang suatu alternatif yang paling baik bagi keperluan sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai keberuntungan sehingga publik dapat berkontribusi dalam pembangunan negaranya.

Parker berpendapat bahwa (Anggara, 2016:502) merumuskan kebijakan publik sebagai tujuan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah pada periode tertentu untuk menanggapi terhadap suatu objek yang krisis. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keputusan mutlak haruslah memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dan biasanya memuat prosedur pencapaian tujuan yang telah ditargetkan dengan kesepakatan bersama.

Anderson (Nurcholis dan Enceng, 2019:7.1) menguraikan bahwa ada lima hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pertama, sasaran ataupun program haruslah mengarah pada perilaku random atau peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Kedua, kebijakan sebagai suatu konsep perilaku aparatur negara perihal

sejumlah kebebasan pengambilan keputusan sendiri secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus sesuai dengan apa yang pemerintah secara nyata kerjakan, bukan dengan rencana yang dikatakan akan diberbuat. Keempat, bentuk dari sebuah kebijakan dapat berupa hal yang positif maupun negatif. Kelima, kebijakan yang berwujud positif berlandaskan pada ketetapan hukum dan kekuasaan, sedangkan tujuan dari kebijakan publik ialah berhasilnya kesejahteraan untuk warga negara melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih secara sah dan otentik sebab peraturan tersebut ditetapkan oleh institusi yang mempunyai pernyataan yang sah dalam memutuskan pada sistem pemerintahan. Kebijakan dapat diartikan menjadi suatu hukum yang harus ditaati oleh publik dan aturannya bersifat mengikat.

Berdasarkan pandangan di atas, tujuan utama dari suatu kebijakan publik ialah menyangkut kepentingan khalayak umum. Implementasi kebijakan harus sebuah jawaban terhadap berbagai keinginan, masalah, aspirasi, serta pandangan sosial dan moral pada masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan lancar bila pemerintah berhasil melaksanakan suatu kebijakan publik dengan tepat dan relevan. Menciptakan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan yang dibuat perlu adanya tahapan dalam analisis kebijakan yang sesuai, yaitu:

1) Pemantauan, dapat menghasilkan informasi yang berkaitan dengan sebab akibat dari kebijakan pada masa lalu.
2) Prakiraan, berupa memprediksi suatu hasil informasi mengenai konsekuensi pada masa mendatang dari berbagai kebijakan.

3) Evaluasi, yaitu membandingkan dan menilai hasil informasi mengenai nilai kebijakan masa lalu dan masa mendatang.

4) Rekomendasi, ialah memberikan petunjuk atau pandangan yang memunginkan menciptakan informasi mengenai cara bertindak pada masa mendatang yang akan membawa dampak yang bermakna.

Tahapan analisis umum yang berhubungan dengan dengan metode-metode analisis kebijakan dalam proses analisis kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

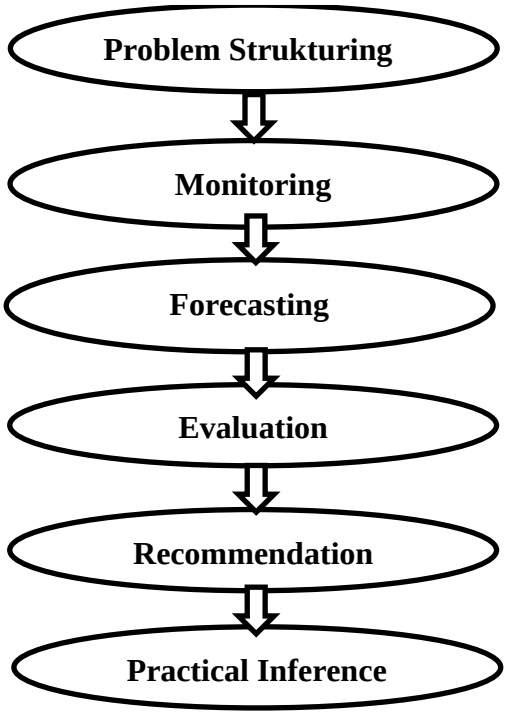

(Sumber:Anggara, 2016:514)

Gambar 2.1 Proses hirarki kebijakan secara umum

Bagian utama dalam kebijakan publik adalah tahapan kebijakan publik. Sudut pandang dari kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan kerja atau kesatuan

jaringan yang saling berkaitan dari satu tahap ketahap lainnya. Menurut William Dunn (Anggara, 2018:120) ada beberapa tahapan analisis yang harus dilaksanakan, yaitu :

1) Penyusunan agenda

   Merupakan suatu tahap dan proses yang tepat sasaran dalam ranah kebijakan publik secara nyata. Di dalam Proses ini ada celah untuk memahami persoalan secara umum dan mengutamakan pada agenda publik yang menjadi jaminan. Apabila suatu isu mencapai status sebagai masalah publik dan dijadikan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak memperoleh pengakuan publik lebih dari pada isu lainnya.

2) Formulasi Kebijakan

   Permasalahan yang telah ada pada tahap sebelumnya, selanjutnya dikelola oleh implementator kebijakan. Isu-isu tersebut akan dicarikan solusi yang paling baik. Masalah yang dipecahkan berasal dari beberapa pilihan terbaik kebijakan yang telah ada, sama halnya dengan perjalanan suatu masalah untuk bergabung ke dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dapat diterapkan sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah.

3) Adopsi/legitimasi

   Bertujuan memberikan wewenang pada tahap mendasar pemerintahan. Jika keputusan legitimasi dalam ruang lingkup masyarakat diatur oleh kewenangan rakyat, maka warga negara akan mengikuti petunjuk pemerintah dan harus meyakini bahwa keputusan pemerintah adalah sah.

4) Penilaian/evaluasi kebijakan

Evaluasi dilihat sebagai suatu pekerjaan fungsional, berarti evaluasi kebijakan tidak hanya berlaku pada proses akhir, tetapi juga berlaku dalam keseluruhan dari proses kebijakan. Tahap evaluasi terdiri atas proses merumuskan masalah, program kegiatan yang disampaikan, mengerjakan masalah kebijakan, tahap pelaksanaan, dan dampak nyata dari program kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dari semua proses kebijakan dan sebuah metode supaya kebijakan tersebut bisa memperoleh tujuan yang telah dikehendaki. Tahapan Implementasi dapat dikerjakan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Menurut Wahab (Anggara, 2016:530) implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan sebagai suatu tahapan untuk melaksanakan keputusan kebijakan, yang berwujud berkas perundang-undang, dekrit presiden, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, perintah dari eksekutif dan keputusan pengadilan.

Menurut Mazmania dan Sabatier (Anggara, 2016:532) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan dasar yang berwujud keputusan peradilan, perundang-undang dan bentuk perintah keputusan eksekutif. Keputusan tersebut menjelaskan suatu isu yang ingin ditangani, serta secara jelas sasaran yang ingin diperoleh dengan beberapa metode untuk mengatur proses implementasinya. Masalah dari implementasi kebijakan bermakna untuk berusaha mengerti secara nyata terjadi setelah suatu program ditetapkan dan dirumuskan, yakni rangaian peristiwa yang terjadi sesudah tahap

pengesahan kebijakan negara, baik berkaitan dengan usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk memberikan efek tertentu kepada masyarakat secara luas.

Tahap dari implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan instansi administrasi yang bertanggungjawab mengerjakan program dan memperlihatkan kepatuhan pada sekelompok sasaran, melainkan berkaitan pula dengan rangkaian kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung memperoleh perilaku dari pihak-pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Grindle dan Quade (Anggara, 2018:261) mengemukakan bahwa penilaian terhadap kinerja implementasi kebijakan publik haruslah mengamati variabel kebijakan, lingkungan, dan organisasi. Petenapan perhatian diperlukan agar kebijakan secara tepat dipilih, sehingga masyarakat bisa berkonstribusi secara maksimal untuk mencapai target sasaran yang diharapkan. Ditemukannya kebijakan yang telah terpilih maka perlu adanya organisasi pelaksana agar sumber daya dan kewenangan tercipta guna mendukung pengimplementasian kebijakan bagi pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (Anggara, 2018:262) tertuju pada tiga hal, yaitu:

1) Tingkatan ketaatan birokrat kepada birokrat dilevel atasnya ataupun struktur birokrat diatur dalam perundang-undangan.
2) kemudahan aktifitas dan persoalan yang tidak ada.

3) Pengimplementasian dari semua program dapat terarah dan memberikan manfaat.

2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan *top-down* atau disebut dengan istilah *policy centered*, karena berfokus dan berusaha mendapatkan fakta bisakah kebijakan tersebut menjadi efektif atau tidak. Pendekatan ini lebih berfokus pada faktor penghambat dari implementasi kebijakan karena menerangkan permasalahan atau faktor kegagalan implementasi.

1. Model Christopher Hood

Hood (Anggara, 2018:245) dalam bukunya yang berjudul "*Limit to administration"* memberikan lima syarat supaya implementasi bisa berjalan dengan baik, yaitu:

a. Bentuk dari implementasi yang sesuai merupakan hasil dari instansi yang baik, seperti militer menggunakan hirarki yang jelas.
b. Jelasnya nilai-nilai dan tujuan.
c. Sekelompok orang yang akan melakukan beberapa hal.
d. Antara organisasi satu dengan organisasi lain harus memiliki komunikasi yang sempurna.
e. Tidak tertekan oleh waktu.

2. Model George Charles Edward III

Dalam model yang dikembangkan George Charles Edward III (Suntoro dan Hariri, 2015:68–69), menguraikan empat variabel yang mempengaruhi kegagalan

atau keberhasilan implementasi. Keempat variabel terdiri dari komunkasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang baik harusnya sudah dibangun sejak formulasi. Penyaluran berita diperlukan agar pencetus dari keputusan dan implementator semakin yakin dalam melaksanakan tiap-tiap kebijakan yang akan digunakan pada publik. Tiga indikator untuk menentukan keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu:

- Transmisi, implementasi kebijakan publik harus disalurkan kepada birokrat pelaksana. Persoalan transmisi sering terjadi pada saat pelaksana menolak perintah atau tidak menyetujui kebijakan dengan cara menutup saluran komunikasi yang diperlukan.
- Kejelasan (*Clarity*), perlu adanya jelasnya tujuan dan metode apa yang digunakan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang telah diputuskan.
- Konsistensi, implementasi yang efektif harus membutuhkan sikap yang jelas tidak berubah-ubah. Keteraturan dalam menjalankan program yang telah disepakati sehingga tidak ambigu ketika melaksanakannya.

b. Sumber daya

Dalam mengimplementasian kebijakan publik perlu adanya sumber daya. Hal ini sebagai pendukung agar terlaksana dengan baik, sumber daya yang diperlukan:

- Staf, terkait dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksana dan kemampuan yang dimiliki oleh staf tersebut. Tentunya harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- Informasi, berkaitan dengan data dan cara mengerjakan kebijakan.
- Kewenangan, suatu yang diinginkan oleh implementator tergantung sangat beragamnya kebijakan yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang kerja yang telah diberikan.
- Fasilitas, terdiri atas fasilitas fisik pendukung yang dibutuhkan untuk melancarkan proses kebijakan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari implementator terhadap kebijakan program yang harus dikerjakan karena tiap-tiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang mempunyai komitmen tinggi supaya tercapai tujuan sasaran kebijakan yang diharapkan. Ada empat unsur utama yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan pelaksana dalam melakukan kebijakan yaitu, kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana serta intensitas respons.

d. Struktur birokrasi

Edward III menetapkan suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur pekerjaan dan kegiatan implementator, karena biasanya pelaksanaan

program melibatkan lebih dari satu institusi. Manfaat dari penetapan prosedur kerja ini agar terlaksana dengan teratur dan dipahami oleh target sasaran.

3. Model Merilee S. Grindle

Grindle mengemukakan dalam melaksanakan suatu kebijakan tergantung pada isi dan maknanya, serta pencapaian kesuksesan bergantung pada tiga bentuk variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

a) Isi kebijakan

Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- Adanya program yang mempengaruhi sebuah kepentingan.
- Beberapa manfaat yang akan diperoleh.
- Luasnya perubahan yang dikerjakan.
- Kewenangan dalam pengambilan keputusan.
- Yang menjalankan sebuah program.
- Ketersediaan sumber daya.

b) Makna implementasi

- Kewenangan, keterkaitan, dan Langkah strategi pelaksana yang terlibat.
- Sikap penguasa dan lembaga.

4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sebastier

Mazmania dan Sebastier (Anggara, 2018:268) berpendapat bahwa analisis implementasi kebijakan berperan penting dalam menggambarkan tiap-tiap variabel

yang mempengaruhi terwujudnya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga macam bagian, yaitu:

a. sulit tidaknya persoalan yang ditangani, mencakup:

- Kesulitan yang bersifat teknis.
- Sikap dan perilaku kelompok sasaran yang beragam.
- Perbandingan target kelompok dengan presentasi masyarakat.
- Ruang lingkup perubahan perilaku yang dibutuhkan.

b. Kemampuan dalam memutuskan kebijaksanaan untuk menyusun secara tepat proses implementasi, mencakup:

- Konsistensi tujuan dan kejelasan
- Digunakannya teori kausal yang baik.
- Ketetapan alokasi sumber biaya.
- Keterpautan struktur dari lembaga pelaksana.
- Aturan ketetapan dari badan pelaksana.
- Rekrutmen aparat pelaksana.
- Saluran formal pihak luar.

c. Pengaruh langsung terhadap berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang terdapat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, mencakup:

- Keadaan sosial, ekonomi dan teknologi.
- Dukungan dari masyarakat.

- Sumber dan sikap yang dipunyai kelompok.
- Dukungan dari pejabat elit.
- Komitmen dan kemampuan *leadership* para pejabat pelaksana.

5. Model Van Horn dan Van Meter

Van Horn dan Van Meter (Wahab, 2016:165) membuat tipologi kebijakan berdasarkan jumlah setiap perubahan yang akan diperoleh, dan jangkauan komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak yang terlibat dalam tahapan implementasi. Pernyataan lain dikemukakan oleh kedua ahli di atas adalah jalan yang mengkaitkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang selalu berhubungan, variabel yang dimaksud adalah:

- Tujuan standarisasi kebijakan.
- Asal muasal kebijakan.
- Ciri-ciri badan /instansi pelaksana.
- Komunikasi yang terjalin antar organisasi terkait dan beberapa kegiatan pelaksanaan.
- Sikap aparat pelaksana.
- Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

6. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 2016:167) mengimplementasikan kebijakan negara mencakup kriteria sebagai berikut:

- Keadaan eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi.

- Tersedianya sumber daya dan waktu yang cukup bagus.
- keragaman sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
- Sikap bijaksana aparat yang melakukan.
- Hubungan yang saling ketergantungan harus diminimalisir.
- Kesepakatan dan pemahaman terhadap tujuan.
- Pekerjaan dirincikan dan diletakkan pada urutan yang tepat.
- Koordinasi dan komunikasi yang terjalin harus sempurna.
- Pelaksana yang mempunyai wewenang bisa menuntut dan memperoleh ketaatan yang sempurna.

Pendekatan kedua adalah *bottom-up,* fokusnya terletak pada tingkat birokrat dan kelompok sasaran. Implementasi akan tercapai jika masyarakat dilibatkan dalam tiap tahap pelaksanaan kebijakan. Pendekatan *bottom-up* dimulai dengan pengenalan jejaring para aktor yang terlibat dalam mengutarakan layanan dari satu area ataupun lebih area lokal, dan ditanyai tentang tujuan, trategi, aktifitas, dan kontak yang sudah dibuat. Pendekatan yang dikembangkan oleh Hanf, Hjern, dan Porter (Wahab, 2016:216–218) memiliki beberapa keunggulan, pertama metodologi dikembangkan secara eksplisit dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi jaringan kebijakan. Kedua, menilai tingkat kepentingan relatif dari berbagai program pemerintah *vis a vis* organisasi privat dan kekuatan-kekuatan pasar dalam menangani permasalahan. Ketiga, pendekatan ini mampu menangani area kebijakan atau masalah yang melibatkan serangkaian program publik dan privat, yang semuanya sama penting.

Selain keunggulan-keunggulan, pendekatan ini memiliki keterbatasan yaitu para peneliti *bottom-up* terlalu menekankan kemampuan *periphery* untuk menekan pusat dan gagalnya memulai dari teori eksplisit mengenai faktor-faktor yang memengaruhi subjek masalah.

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2016:257) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, karakteristik yang timbul dari masalah (*tractability of the problem*), karakteristik dari isi kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), karakteristik dari kondisi lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*). Berikut merupakan penjelasan mengenai tiga faktor tersebut:

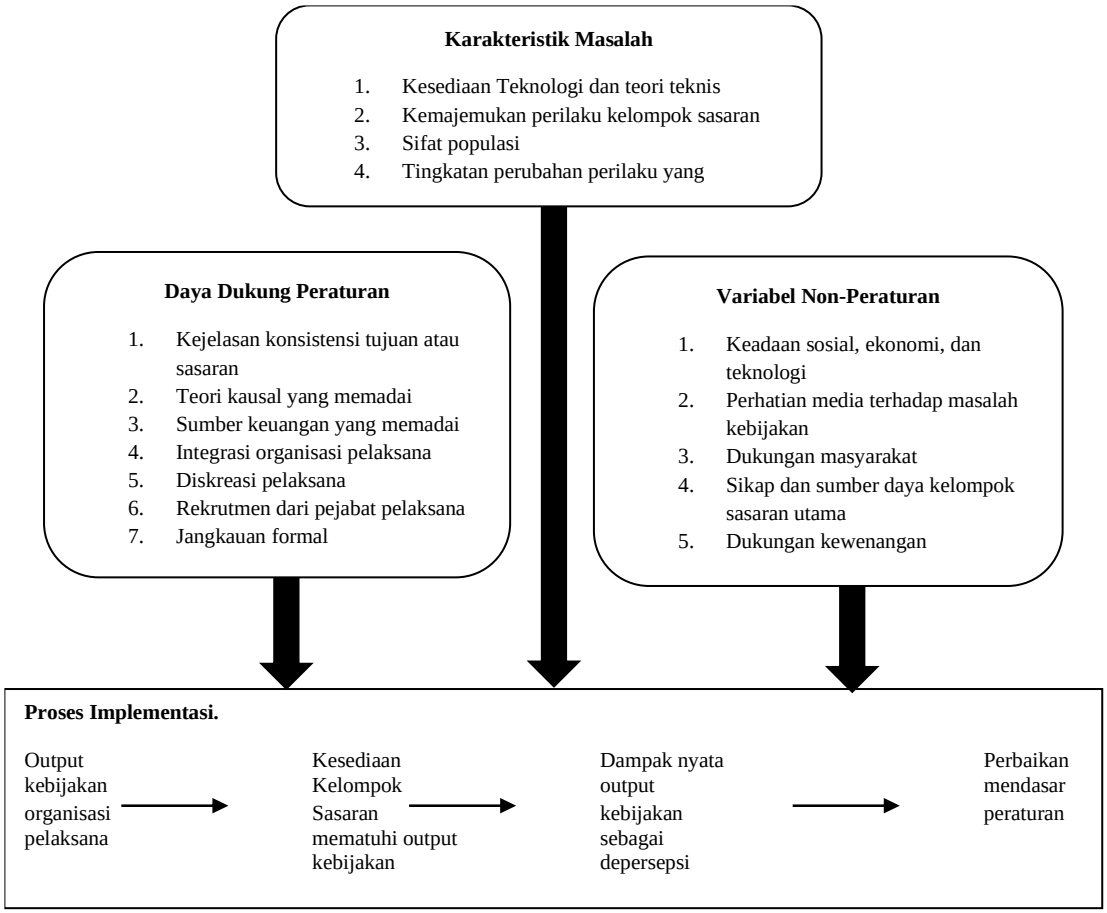

(Sumber: Sahya Anggara, 2018:258)

Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier

1. Karakteristik Masalah

   a. Tingkat kesulitan Teknis dari permasalahan, karena ada sebagian persoalan sosial dapat dikerjakan secara teknis dan disisi lainnya beberapa masalah yang sukar untuk dipecahkan.

   b. Tingkatan keragaman kelompok sasaran. Apabila kelompok sasarannya homogen maka Suatu program relatif mudah diimplementasikan.

c. Ukuran sekelompok yang dijadikan target terhadap jumlah populasi. Suatu program kegiatan akan sulit untuk dikerjakan jika sasarannya meliputi banyak populasi.

d. Jangkauan perubahan perilaku yang diinginkan. Sebuah program secara mudah dilaksanakan jika tepat dalam penyampaian kepada masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan

a. Kejelasan isi implementasi kebijakan akan mudah dipahami maksud dan tujuan oleh pelaksana jika jelas dan terperincinya isi dari kebijakan tersebut.

b. Seberapa besar program yang diimplementasikan memiliki dukungan teoritis.

c. Finansial adalah faktor penting untuk setiap program sosial, maka sumber daya finansial harus besar.

d. Seberapa banyak keterkaitan dan dukungan setiap lembaga pelaksana.

e. Lembaga pelaksana mempunyai ketentuan yang jelas.

f. Ukuran kesungguhan birokrat untuk mencapai tujuan.

g. Sejauh mana jangkauan pihak luar bergabung untuk pelaksanaan program.

3. Lingkungan Kebijakan

a. Keadaan ekonomi sosial masyarakat dan tingkat teknologi yang dimiliki. Karena masyarakat yang sudah terbuka lebih mudah menerima pembaharuan ketimbang masyarakat yang belum terbuka atau tradisional.

b. Partisipasi dan bantuan masyarakat terhadap kebijakan. Biasanya kebijakan yang menghasilkan manfaat dan dampak nyata lebih mudah mendapat perhatian dari masyarakat.

c. Sikap dari kelompok tertentu. Caranya bisa dengan kelompok tertentu melakukan campur tangan terhadap keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pelaksana melalui berbagai saran. Kelompok pemilih juga memiliki kewenangan untuk mempengaruhi lembaga pelaksana caranya dengan melalui kritik yang dipublikasikan.

d. Kesungguhan serta keterampilan dari birokrat dan pelaksana tugas agar dapat merealisasiakan prioritas tujuan tersebut.

2.1.5 Faktor Yang Menghambat Kebijakan

Hal-hal yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan publik menjadi gagal adalah sebagai berikut: (Nurcholis, Enceng, dan Amin 2013:7.15)

1. Kebijakan publik yang telah dibuat tidak menjelaskan rincian secara lengkap berdasarkan spesifikasinya.
2. Badan pelaksana tugas yang diberi wewenang untuk menjalankan program kebijakan tidak sesuai.
3. Tidak berkorelasinya tujuan antara instansi satu dengan instansi lainnya.
4. Insentif dan biaya yang telah dipersiapkan tidak memadai, karena program kebijakan yang akan dikerjakan tidak seimbang dengan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Keterbatasan keahlian tertentu membuat implementator sulit untuk mengembangkan diri.

6. Belum memadainya sarana prasarana, tenaga atau sumber daya manusia, finansial serta organisasi pendukung.
7. Kegagalan komunikasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut uraian tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1) Penelian yang dilakukan oleh (Reza, 2016), yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang dimuat pada Jurnal Katalogis, Volume 04, Nomor 6, Juni 2016. Pendekatan menggunakan metode deskritif kualitatif. Diperoleh hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak belum optimal, hal ini masih terkendala aspek-aspek dalam mendukung implementasi kebijakan yang sejauh ini belum baik.
2) Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain, Heriyanto, dan Karneli, 2020), yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pakan Dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang dimuat pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020 (96-105). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa Implementasi Program kebijakan telah dikerjakan dengan cukup baik akan tetapi belum dikerjakan secara maksimal. Dampak dari implementasinya yaitu peningkatan hasil budidaya ikan. Bagi anggota nelayan yang sudah bergabung

dalam Pokdakan belum merasakan manfaat yang sama dari bantuan yang dilimpahkan oleh Dinas Perikanan Kota Kampar.

3) Penelitian yang dilakukan oleh (Ichtiar, Marefanda, dan Mardhiah, 2021), yang berjudul *Implementation of Marine and Fisheries Business Actor Card Policy* (KUSUKA) *in West Aceh Region* yang dimuat pada Jurnal *Public Policy*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, ISSN 2502-0528. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang dipakai didalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan di Kabupaten Aceh Barat masih kurang baik karena masing-masing indikator yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birikrasi dan disposisi belum baik serta terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

4) Penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani dan Malau, 2019), yang berjudul Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimuat pada Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, Volume 03, Nomor 01, Tahun 2019. Penelitian ini memakai metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif naturalistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat sasaran kebijakan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Masih banyak ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti jalan raya dan pasar, hal ini terjadi karena terkendala komunikasi yang dilakukan sesama aparat terkait masih belum maksimal.

5) Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2015), yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru), yang termuat dalam Jom FISIP, Volume 02, Nomor 01, Februari 2015. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data sekunder melalui wawancara langsung, obvervasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi peraturan daerah belum seluruhnya tercapai dengan baik karena belum tercukupinya sumber daya manusia sendiri dalam melakukan pembinaan ke lapangan, serta komunikasi dan kerja sama antara instansi-instansi pemerintahan belum Tercipta dengan baik.

6) Penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati, 2020), yang berjudul Efektifitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun, yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020. Di dalam penelitian ini menerapkan jenis metode kualitatif dengan Teknik Purposive Sampling sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik karena tujuan dan pencapaian hasil dari peraturan tersebut tidak sama dengan apa yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dari pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakatnya.

7) Penelitian yang dilakukan oleh (Isna, 2009), yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga), yang termuat dalam pada Wacana, Volume 12, Nomor 3, Juli 2009. Metode penelitian dengan metode memfokuskan pada proses dan makna dari usaha pengembangan ternak. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi sulit terwujud karena tidak didukung oleh sumber daya keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian tempat lokasi, kemampuan sumber daya manusia, kepastian keamanan lokasi serta kecenderungan pelaksana yang menggunakan pendekatan *top-down*.

2.3 Kerangka Penelitian

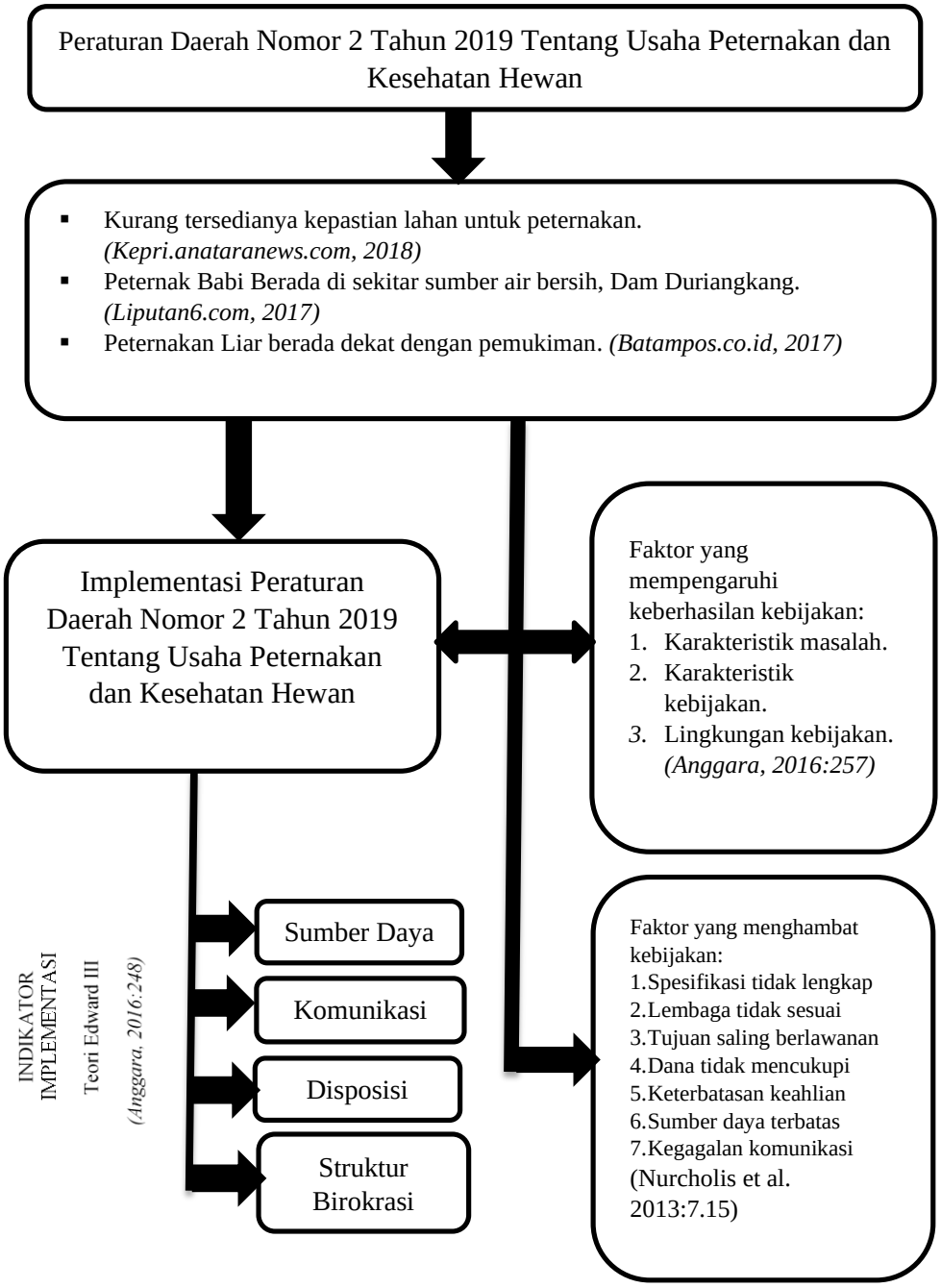

(Sumber: Penelitian 2021)

Gambar 2.3 Kerangka penelitian

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikombinasikan dengan teknik perolehan data, serta hasil dari penelitian kualitatif lebih mengarah kepada nilai yang bersifat menyeluruh. Alasan menggunakan cara ini karena peneliti ingin mengetahui tentang kondisi alamiah, bukan dalam kondisi terkendali ataupun eksperimen yang terkontrol. Peneliti pengunjungi lokasi sehingga jenis penelitian deskriptif kualitatif menjadi lebih tepat untuk diterapkan untuk mengungkap fakta tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Spradley (Sugiyono, 2019:274), disebut sebagai satu domain atau beberapa domain yang berkaitan dengan dari kondisi sosial untuk menyempurnakan suatu penelitian. Penentuan arah dalam proposal berlandaskan pada tingkat pembaharuan informasi yang akan didapatkan dari situasi sosial. Untuk memudahan analisis penulis mengenai masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Batam, yang meliputi:

a) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam, yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kota Batam yang terdiri dari: faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian sumber data merupakan subjek suatu data tersebut diperoleh terdapat 2 (dua) sumber data yang dimanfaatkan dipenelitian dalam informasi yaitu:

a) Data primer merupakan sebuah data informasi dikumpulkan peneliti secara langsung dari pihak informan yang diamati dan di wawancarai adalah sumber utama di dalam penelitian ini. Teknik menggunakan pemilihan informan menggunakan *Proposive Sampling* untuk menentukan sampel melalui keputusan tertentu, dipenelitian ini yang menjadi sumber informan yaitu Pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu sebagai Kepala Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan, Kasi Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta masyarakat pemilik usaha peternakan.

b) Data sekunder merupakan asal muasal data dari beberapa macam informasi dan teori yang diperoleh secara abstrak, seperti isi sebuah buku, artikel di website,

serta bentuk dokumen yang ada dalam website meliputi laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses perolehan data primer untuk keperluan suatu penelitian. Untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan persoalan dalam penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi.

   Observasi disebut dengan istilah pengamatan, dapat berupa pemantauan dan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera. Observasi dikatakan sebagai pengamatan secara langsung terhadap masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian dan memungkinkan jumlah responden yang tidak terlalu besar sehingga mudah melakukan penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk mencari informasi melalui tanya jawab, sehingga memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang dilakukan peneliti serta dapat diterapkan dalam suatu topik tertentu. Melakukan wawancara penelitian merujuk pada data primer yaitu informan. Beberapa kriteria informan di dalam penelitian ini adalah:

a. Informan yang secara langsung berpartisipasi dalam membuat penelitian dan memang mengetahui permasalahan, informasi yang disampaikan secara spontan, lugas dan jelas.
b. Informan merupakan aktor utama karena memainkan peran aktif di dalam lingkungan kegiatan sebagai target penelitian.
c. Informan merupakan pelapor lengkap dan mempunyai banyak waktu untuk memberikan keterangan dalam penyampain.

Peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Batam, dan juga pemilik usaha peternakan. Pihak yang menjadi informan penelitian yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ir. Sri Yunelli	Kepala Bidang Peternakan & Kesehatan Hewan
2	drh. Samuel Tampubolon	Kasi Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Rini Kosari, S.Si	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
4	Bapak Roy	Peternak Ayam (Bagan, kelurahan Mangsang, Tg. Piayu)
5	Bapak Jhonson	Peternak Babi (kelurahan Duriangkang, Tg. Piayu)
6	Bapak Marzuki	Peternak Kambing (Mangsang, Kel. Mangsang, Tg. Piayu)
7	Ibu Khoiri	Masyarakat

(Sumber: Peneliti 2021)

3. Dokumen

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, tabel, bagan atau karya-karya dari seseorang yang memuat catatan peristiwa penting. Peneliti menggunakan kajian pustaka yang mendukung dalam penelitian dan data-data terkait permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:321–222), berpendapat untuk menganalisis data kualitatif dikerjakan secara berkesinambungan dan berjalan secara rutin dan tuntas, sehingga data yang diperoleh telah siap digunakan. Berikut model interaktif dalam analisis data.

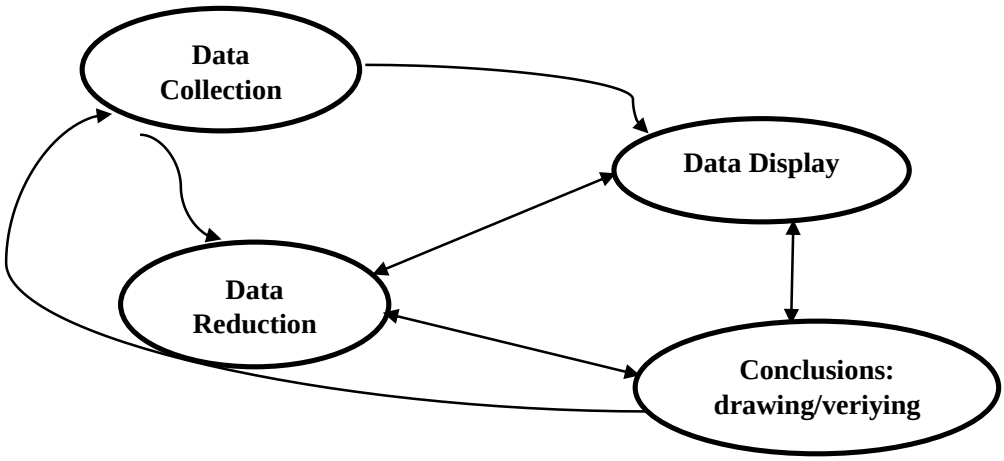

(Sumber: Sugiyono, 2019:322)

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data *(interactive data)*

1. *Data Collection* (pengumpulan Data)

Secara beberapa hari ataupun bulanan data dikumpulkan, sehingga data yang didapatkan berjumlah banyak. Dimulainya penelitian harus melakukan observasi

secara keseluruhan terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, keseluruhan yang disaksikan dan didengar direkam semua.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Merupakan bagian merangkum dan menyimpulkan setiap hal yang dianggap penting, difokuskan pada sebuah situasi yang penting, serta diurutkan bedasarkan pola dan temanya. Deskripsi yang lebih jelas dapat diperoleh dengan mereduksi data, hal ini juga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data setelahnya.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

   Dalam hal menyajikan data peneliti dapat melakukan dalam bentuk pernyataan singkat, bagan, gambar, tabel, hubungan antar kategori, *flowcart* dan lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan pembaca untuk memahami terhadap topik dan pembahasan yang terjadi, selanjutnya dapat merencanakan kegiatan berdasarkan apa yang telah dimengerti.

4. *Data drawing/ Verification*

   Pada permulaanya kesimpulan masih bersifat sementara, dan kesimpulan tersebut tidak akan berubah jika tidak ditemukannya bukti baru yang lebih kuat untuk mendukung tahapan pengumpulan selanjutnya. Jika kesimpulan yang diperoleh pada permulana diperkuat oleh sebuah bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti melakukan kunjungan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan disebut dengan kesimpulan yang sempurna.

3.6 Keabsahan Data

Sugiyono (Pasolong, 2020:181–183) memberikan rujukan bahwa dalam pengujian keabsahan data, keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian sebagai berikut :

1. Uji *Credibility*

   Yaitu menguji kepercayaan terhadap data hasil dari penelitian seperti dikerjakan dengan memanjangan waktu pengamatan, rajin melakukan penelitian, teknik gabungan, menganalisis kasus, dan diskusi. Perpanjangan waktu penelitian untuk meningkatkan kepercayaan data. Teknik gabungan dalam pengujian kredibilitas dibutuhkan untuk pengecekan data dari sumber data dengan berbagai metode dan waktu. Analisis kasus merupakan mengamati dan menilai masalah yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian pada waktu tertentu.

2. Uji *Transferability*

   Yaitu validitas eksternal pada penelitian kuantitatif, sedangkan yang dimaksud dengan validitas eksternal mengarah pada derajat ketepatan dan penerapkan hasil penelitian pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

   Yaitu dalam penelitian kualitataif, uji *dependability* merupakan suatu cara dengan mengerjakan perbaikan disetiap tahapan penelitian yang dilakukan.

4. Uji *Confirmability*

   Di dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* serupa dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dikerjakan secara bersama-sama. Menguji

confirmability berarti menguji hasil penelitian dihubungkan dengan tahapan penelitian.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi

   Dinas Ketahanan Pangan Dan peternakan Kota Batam merupakan tempat penelitian yang beralamat di jalan Raja Ali Haji No. 3, Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Peneliti juga melakukan penelitian kepada peternak dan masyarakat di Wilayah Tanjung Piayu. Lokasi tersebut diambil karena mempunyai keseluruhan aspek pendukung agar penelitian dapat dilakukan dengan lancar.

2. Jadwal Penelitian

   Pengelolaan data dan kunjungan penelitian dilaksanakan pada saat jam kerja kantor instansi setempat. Penelitian dilakukan pada kurun waktu 4 (empat) bulan, terhitung dari bulan Maret sampai Juni 2021.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Pengumpulan Data																
4.	Penelitian Lapangan																
5.	Pengelolaan Data																
6.	Analisis dan Simpulan																
7.	Penulisan Laporan Akhir																
8.	Penyerahan Laporan																

(Sumber: Penelitian 2021)